

UPAYA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI *CULTURE SHOCK* PADA IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

EFFORTS OF THE EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE CENTER (BPMP) OF YOGYAKARTA SPECIAL REGIONAL PROVINCE IN HANDLING CULTURE SHOCK IN THE IMPLEMENTATION OF THE INDEPENDENT CURRICULUM

Oleh: Gabrielo Firmanda Ayub Paskhala, Universitas Negeri Yogyakarta
gabrielofirmanda.2019@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani culture shock pada implementasi Kurikulum Merdeka. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari informan dan key informan yang merupakan pegawai BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BPMP Provinsi DIY telah melakukan upaya penanganan culture shock pada Kurikulum Merdeka melalui Teori culture adjustment training Indrianie (2012) yang setidaknya terdiri dari Metode giving information, cultural sensitisation, dan experimental learning by doing. Pelaksanaan Metode giving information yang dilakukan melalui Program Advokasi dan Konsultasi Sobat Istimewa (AKSI), Program Festival Kurikulum Merdeka yang terdiri dari beberapa tahapan, dan Program Pendampingan berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS). Upaya penanganan melalui Metode cultural sensitisation dilaksanakan melalui Kegiatan Gelar Wicara sesi 2. Metode experimental learning by doing dilaksanakan melalui Program Bimbingan Teknis bagi Pengawas Sekolah.

Kata kunci: Kurikulum Merdeka, culture shock, BPMP

Abstract

This research aims to describe the efforts made by BPMP Yogyakarta Special Region Province in dealing with culture shock in the implementation of the Merdeka Curriculum. The type of research carried out was descriptive research with a qualitative approach. The subjects of this research consisted of informants and key informants who were BPMP employees of the Yogyakarta Special Region Province. The data collection techniques used in this research are through interviews, observation, and documentation. Based on the research results, it can be concluded that the DIY Province BPMP has made efforts to handle culture shock in the Independent Curriculum through Indrianie's (2012) culture adjustment training theory, which at least consists of methods of giving information, cultural sensitization, and experimental learning by doing. The implementation of the giving information method is carried out through the Sobat Istimewa Advocacy and Consultation Program (Advokasi dan Konsultasi Sobat Istimewa/AKSI), the Independent Curriculum Festival Program, which consists of several stages, and the Mentoring Program based on Standard Operating Procedures (POS). Efforts to handle this through the cultural sensitization method are carried out through the talk show session 2. The experimental learning by doing method is implemented through the Technical Guidance Program for School Supervisors.

Keywords: Independent Curriculum, culture shock, BPMP

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah sarana untuk menciptakan kesejahteraan berkelanjutan di masa yang akan datang. Pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas pada sebuah negara (Firdaus, 2021). Negara telah menjamin pendidikan setiap warganya melalui Peraturan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan dilanjutkan pada Ayat 2 yaitu “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Salah satu pelaksanaan dari peraturan perundangundangan ini adalah dengan adanya sistem pendidikan formal yang dimulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi serta pendidikan nonformal yang ada di sekitar masyarakat. Pendidikan tersebut dapat meningkatkan kecerdasan dan mengasah keterampilan individu untuk mempersiapkan diri pada peranan tertentu (Haderani, 2018: 44).

Kemenristekdikbud membentuk Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) pada setiap provinsi di Indonesia melalui Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 dengan tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat pada tingkat provinsi. Dalam hal ini, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

(BPMP) berada pada naungan Kemendikbudristek tepatnya Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen). Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) merupakan sebuah wujud nyata dari hadirnya sistem desentralisasi di bidang pendidikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga pendidikan ini melakukan tanggung jawab sesuai dengan susunan lembaga bersangkutan kepada lembaga di atasnya secara struktural. Berhubungan dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, saat ini BPMP memiliki tugas baru untuk mengawal dan menyukseskan implementasi Kurikulum Merdeka. Nadiem Makarim selaku menteri menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan kemerdekaan setiap unit pendidikan untuk berinovasi secara bebas dengan tetap berlandaskan Pancasila. Kurikulum Merdeka diharapkan dapat menjadi kurikulum yang transformatif sehingga memberikan solusi pada setiap tantangan dan masalah pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, dalam melaksanakan perubahan baik ini terdapat sejumlah problematika yang timbul karena adanya berbagai kendala dan ketidaksiapan dari agen pelaksana kebijakan.

Perubahan kurikulum dari Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka sangat tepat untuk dilaksanakan guna memperbaharui kurikulum pendidikan

di Indonesia, akan tetapi dalam implementasinya perubahan tersebut telah menimbulkan berbagai problematika yang serius di tengah praktisi pendidikan. Berdasarkan forum group discussion yang dilakukan Akhmad Ritaudin bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman telah menghasilkan beberapa temuan bahwa perubahan dari Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka telah menyebabkan beberapa problematika yang cukup serius. Problematika pertama dialami oleh guru di Kabupaten Sleman yang merasa kesulitan dalam menentukan bagaimana bentuk penilaian dan rapor dalam Kurikulum Merdeka ini. Problematika yang kedua adalah timbulnya perasaan khawatir para guru apabila materi yang diajarkan sekolah tidak sesuai dengan ujian akhir yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga siswa merasa kesulitan saat menghadapi ujian. Sedangkan problematika yang ketiga adalah sebagian guru dan kepala sekolah masih belum memiliki pemahaman yang belum mendalam mengenai implementasi Kurikulum Merdeka.

Secara lebih detail, problematika dari Implementasi Kurikulum Merdeka dijelaskan dalam penelitian skripsi yang diteliti oleh Iit Pujiyati (2022). Penelitian ini meneliti tentang fenomena culture shock yang dialami oleh beberapa Sekolah Menengah Atas yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Penelitian Iit Pujiati dengan objek penelitian SMAN 8 Yogyakarta, SMAN 1 Kasihan, dan SMAN 1 Minggir menghasilkan temuan bahwa faktor terbesar penghambat sekolah dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka adalah munculnya fenomena culture shock yang disebabkan oleh terbatasnya informasi tentang Implementasi Kurikulum Merdeka. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa rendahnya motivasi yang dimiliki oleh guru senior untuk melakukan transisi kurikulum menjadi faktor lain yang menghambat sekolah dalam melakukan perubahan dari Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka.

Minimnya informasi dan pemahaman tentang Implementasi Kurikulum Merdeka telah menimbulkan fenomena sosial culture shock khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penelitian Iit Pujiyati serta forum group discussion yang dilakukan oleh Akhmad Ritaudin (2023: 27) bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman. Kasus tersebut selaras dengan pendapat yang disampaikan Muin (2006: 27) bahwa culture shock merupakan kondisi ketika terjadi guncangan jiwa atau tekanan mental individu atau kelompok karena belum adanya kesiapan dalam menerima unsur-unsur perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dalam perspektif sosiologi,

culture shock merupakan fenomena sosial yang sangat umum dialami oleh individu yang sedang mengalami perubahan di dalam hidup sehari-harinya. Fenomena culture shock tidak selalu tentang hal negatif dan menjadi hal yang menakutkan karena sangat umum dialami oleh seseorang. Namun, perlu diketahui bahwa culture shock juga dapat memberikan dampak negatif yang berkelanjutan hingga mempengaruhi hubungan individu dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Culture shock terdiri dari beberapa komponen penyusun yaitu affective, behaviour, dan cognitive (Dianingrum, 2022: 682). Affective merupakan rasa kebingungan, kecemasan, dan kecurigaan yang ditimbulkan dari adanya suatu perubahan. Komponen affective culture shock pada implementasi Kurikulum Merdeka dibuktikan dengan adanya rasa kebingungan dan kecemasan yang dihadapi oleh guru dan satuan pendidikan karena terbatasnya informasi terkait kurikulum ini. Behaviour adalah pola interaksi yang terganggu sebagai akibat adanya perubahan kurikulum yang dialami oleh guru dan satuan pendidikan. Sedangkan komponen cognitive merupakan perpaduan antara perasaan curiga dan interaksi yang kurang baik yang menghasilkan rasa tidak percaya diri pada guru dan satuan pendidikan ketika mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Penanganan culture shock tidak harus selalu berfokus pada culture shock itu sendiri, penanganan juga dapat dilakukan dengan Teori culture adjustment training yaitu sebuah cara untuk mengatasi berbagai penyebab dari permasalahan penyebab terjadinya culture shock melalui berbagai pelatihan dan penyampaian informasi sehingga individu mampu menyesuaikan dengan perubahan. Teori culture adjustment training dikemukakan oleh Indrianie (2012: 152) yang mencakup cultural sensitisation yaitu pemberian pemahaman dengan membandingkan perilaku individu yang mengalami culture shock dengan individu yang telah melalui culture shock, kemudian experimental learning by doing yaitu sebuah pelatihan kepada individu agar mampu mengikuti perubahan, dan giving information yaitu penyampaian informasi melalui tulisan, gambar, dan diskusi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan upaya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani culture shock pada implementasi Kurikulum Merdeka.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Karangnongko, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada 11 Juni 2024 hingga 19 Juli 2024.

Target/Subjek

Penelitian Penelitian ini memiliki subjek penelitian sebanyak 6 orang yang merupakan pegawai BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti membagi subjek penelitian menjadi dua jenis yaitu informan dan key informan. Informan merupakan subjek penelitian yang mampu memberikan informasi tentang situasi dan latar belakang penelitian. Sedangkan key informan merupakan adalah seseorang atau beberapa orang yang paling banyak menguasai informasi terkait objek lapangan (Lexy J. Moelong, 2014). Dalam penelitian ini peneliti mempertimbangkan subjek penelitian berdasarkan kemampuan subjek dalam memberikan informasi terkait upaya penanganan culture shock pada implementasi Kurikulum Merdeka yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Prosedur

Prosedur dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan. Kegiatan tersebut adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kegiatan observasi dilakukan

dengan pra observasi dari website, artikel, observasi di lapangan, dan dialog dengan salah satu pegawai Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan dokumentasi dilakukan melalui kajian-kajian pada dokumen yang berisi pelaksanaan upaya penanganan cultureshock pada implementasi Kurikulum Merdeka yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terkait upaya penanganan culture shock pada implementasi Kurikulum Merdeka.

Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini merupakan data terkait dengan upaya penanganan culture shock pada implementasi Kurikulum Merdeka yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan upaya tersebut. Penelitian ini berpedoman pada Teori culture adjustment training yang dikemukakan oleh Indrianie (2012: 152). Teori ini merupakan upaya yang bertujuan untuk melatih individu yang mengalami culture shock agar mampu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan sosialnya. Teori ini terbagi menjadi tiga metode yaitu Metode giving information, Metode cultural sensitisation, dan Metode experimental

learning by doing. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Bagaimana memaknakan data yang Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data yang diinginkan dapat dikatakan jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data Miles dan Huberman (2014). Tahapan dalam model analisis ini meliputi tiga tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani culture shock pada implementasi Kurikulum Merdeka

Perubahan kurikulum pendidikan sering dilakukan oleh sebuah negara dalam periode yang telah ditentukan. Perubahan kurikulum pendidikan bertujuan untuk menghasilkan output pendidikan yang

sesuai dengan tantangan dan tuntutan pada masa waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Perubahan kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan di Indonesia diurus oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Nadiem Makarim selaku Menteri Kemendikbudristek telah mencanangkan perubahan kurikulum yang semula adalah Kurikulum 2013 berubah menjadi Kurikulum Merdeka. Menindaklanjuti hal tersebut, Kemendikbudristek telah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen dan tersebar pada setiap provinsi di Indonesia. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) memiliki pembagian tugas yang sangat terstruktur dan dibagi berdasarkan program prioritas yang dimiliki oleh Ditjen PAUD Dikdasmen.

Berbagai masalah pendidikan yang timbul ketika adanya perubahan Kurikulum Merdeka juga dibahas dalam Rapat Reboan dan Rapat PMO. Masalah pendidikan tersebut salah satunya adalah adanya culture shock yang dialami oleh satuan pendidikan. BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan upaya penanganan culture shock melalui Teori culture adjustment training (Indrianie, 2012: 152). Dalam teori ini upaya yang dilakukan

dengan tiga metode yaitu giving information, cultural sensitisation, dan experimental learning by doing. Upaya yang dilakukan dapat dikategorikan menjadi Teori culture adjustment training apabila upaya dilaksanakan dengan tujuan melatih individu yang mengalami culture shock agar mampu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan sosialnya. Untuk mengidentifikasi hal tersebut peneliti telah mengidentifikasi bahwa upaya yang dilakukan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah masuk ke dalam teori ini. Berikut adalah deskripsi penelitian terkait upaya penanganan culture shock dengan Teori culture adjustment training:

1. Metode giving information

Metode giving information adalah upaya penanganan culture shock yang dilakukan dengan penyampaian informasi berbentuk tulisan atau gambar. Gambar yang digunakan dalam Metode giving information dapat disajikan melalui gambar diagram atau tayangan bergerak. Penyajian gambar atau tulisan dapat dijelaskan melalui kegiatan diskusi atau tanya jawab yang nantinya akan ditarik kesimpulan. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta telah menangani culture shock dengan memberikan informasi kepada individu melalui beberapa kegiatan pendampingan dilakukan secara luring dan daring dengan

mengandalkan berbagai perkembangan teknologi. Berikut adalah program yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani culture shock melalui Metode giving information:

- a. Program Advokasi dan Konsultasi Sobat Istimewa (AKSI), upaya pertama yang dilakukan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menangani culture shock pada implementasi Kurikulum Merdeka dengan Metode giving information dilakukan melalui Program Advokasi dan Konsultasi Sobat Istimewa (AKSI). Program ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu melalui tatap muka secara langsung atau juga dapat melalui perantara platform online. Guru atau satuan pendidikan yang mengalami kesulitan dan kendala dalam melaksanakan implementasi Kurikulum Merdeka dapat mengakses laman <https://ult.bpmpjogja.kemdikbud.go.id/> yang merupakan laman resmi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Program Pendampingan berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS), upaya selanjutnya yang

dilakukan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani culture shock melalui Metode giving information dilakukan melalui Program Pendampingan berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah disusun oleh lembaga ini. Pelaksanaan dari program ini adalah melakukan pendampingan secara umum berdasarkan instruksi dari Kepala Balai. Adapun proses pendampingan yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya dilakukan berdasarkan pengajuan yang dilakukan oleh guru atau satuan pendidikan, namun pendampingan juga dapat dilakukan berdasarkan arahan Kepala Balai. Dalam melaksanakan pendampingan yang lebih responsif terhadap permasalahan pendidikan dalam wilayah wewenang yang dimiliki, Kepala Balai memberikan instruksi kepada Tim Kerja yang memiliki tugas bersangkutan dengan masalah terkait untuk memberikan pendampingan kepada guru atau satuan pendidikan mengalami kesulitan.

- c. Program Festival Kurikulum Merdeka, Program ini dilaksanakan

oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen di setiap daerahnya. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) diberikan kebebasan bagaimana Festival Kurikulum Merdeka dilaksanakan. Menanggapi kebijakan tersebut Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Program Festival Kurikulum ini melalui beberapa rangkaian kegiatan yaitu Lomba Komik, Pameran, Lomba Kreasi, dan Gelar Wicara. Program ini memiliki Tema besar “Bersama Ciptakan Pembelajaran Berkualitas Melalui Kurikulum Merdeka”.

2. Metode cultural sensitisation

Metode ini adalah salah satu upaya penanganan culture shock yang dilaksanakan dengan pemberian pemahaman kepada individu terkait perubahan. Akan tetapi dalam metode ini cara pemberian pemahaman tidak hanya mengenai perubahan yang terjadi saja, tapi juga mencoba untuk meningkatkan kesadaran individu mengenai dampak yang

akan terjadi sebagai akibat dari perilaku mereka. Cara yang dilakukan dalam teknik ini adalah dengan membandingkan perilaku individu yang sudah tidak mengalami culture shock dan yang sedang mengalami sehingga individu mampu mengikuti perubahan yang ada. Berikut adalah program yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani culture shock melalui Metode cultural sensitisation: Kegiatan Gelar Wicara Sesi 2, Upaya penanganan culture shock yang dilakukan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Metode cultural sensitisation dilaksanakan melalui Kegiatan Gelar Wicara Sesi 2. Kegiatan ini adalah salah satu tahapan dari Program Festival Kurikulum Merdeka. Kegiatan ini dilakukan dengan Prinsip Berbagi Praktik Baik atau penyebaran informasi terkait suatu hal dengan penyampaian semacam testimoni atau pengalaman positif. Tema dalam kegiatan ini adalah “Bersama Ciptakan Pendidikan Berkualitas untuk Semua”. Tujuan Gelar Wicara sesi 2 ini adalah memberikan pandangan positif Kurikulum Merdeka melalui berbagi pengalaman kepada guru dan satuan pendidikan.

3. Metode experimental learning by doing

Metode experimental learning by doing adalah upaya penanganan culture

shock yang dilakukan dengan melatih individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan melalui praktek di lapangan. Dalam metode ini Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berperan untuk melatih Individu yang sedang mengalami culture shock supaya mampu mengatasinya untuk melakukan perubahan. Adapun program yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani culture shock melalui Metode cultural sensitisation adalah sebagai berikut. Program Bimbingan Teknis bagi Pengawas Sekolah, upaya penanganan culture shock melalui metode experimental learning by doing dilakukan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Program Bimbingan Teknis terkait Kurikulum Merdeka yang diselenggarakan untuk Pengawas Sekolah. Program ini memiliki sasaran Pengawas Sekolah karena BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memahami bahwa Pengawas Pendidikan memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pendidikan. BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya memfasilitasi satuan pendidikan melalui Pengawas Sekolah untuk mempelajari platform Merdeka Mengajar juga menjadi salah satu topik pembelajaran dalam Bimbingan Teknis ini. Adapun materi yang dibahas dalam program yang

berlangsung selama dua hari ini adalah terkait Kebijakan Kurikulum Merdeka, Optimalisasi Akun belajar.id untuk menunjang kegiatan siswa di sekolah, platform Merdeka Belajar (PMM), Pemanfaatan Chromebook, Pemanfaatan Google Workspace for Education, dan Optimalisasi Aplikasi Online (Canva).

Faktor pendukung dan faktor penghambat Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan upaya penanganan culture shock

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut adalah pembagian tugas yang terstruktur dalam menjalankan berbagai program strategis yang dimiliki antara BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Ditjen PAUD Dikdasmen. Pembagian tugas ini terbagi dalam PDM pusat dan daerah yang dipimpin oleh seorang person in charge (PIC). Sebuah masalah pendidikan dibahas oleh PIC dalam program management office (PMO) dan Rapat Reboan yang dilaksanakan secara terjadwal setiap satu minggu sekali sehingga permasalahan dapat dibahas antara UPT dengan pusat dengan objektif sesuai dengan informasi. Selain itu faktor pendukung lainnya adalah BPMP Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta juga memiliki sumber daya pegawai yang kompeten untuk memberikan data yang valid terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Faktor pendukung selanjutnya adalah terkait pengalaman semasa covid-19 telah menambah kemampuan para pegawai BPMP dan satuan pendidikan dalam melaksanakan koordinasi melalui platform video conference.

2. Faktor Penghambat

Faktor pertama adalah adanya perubahan kewenangan BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pelatihan dan bimtek secara hierarki kepada guru dan tenaga kependidikan. Faktor penghambat kedua adalah walaupun BPMP telah melaksanakan berbagai upaya sosialisasi dan pendampingan terkait kurikulum ini, masih terdapat sebagian kecil guru dan tenaga kependidikan yang merasa belum mampu untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan yang dimilikinya. Faktor penghambat ketiga adalah terkait jumlah pegawai Jabatan Fungsional yang masih terbatas. Cakupan wilayah yang sangat luas dan tugas tidak mudah membutuhkan jumlah personil yang sepadan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menangani culture shock pada Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Teori culture adjustment training. Pelaksanaan teori tersebut terbagi menjadi Metode giving information, cultural sensitisation, dan experimental learning by doing.
2. Upaya penanganan culture shock melalui Metode giving information dilaksanakan melalui Program Konsultasi Pendidikan atau yang sekarang disebut juga Program Advokasi dan Konsultasi Sobat Istimewa (AKSI), Program Pendampingan berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS), dan Program Festival Kurikulum Merdeka. Metode cultural sensitisation dilaksanakan dengan Program Gelar Wicara sesi 2 dengan Prinsip Berbagi Praktik Baik. Metode experimental learning dilakukan melalui Program Bimbingan Teknis untuk Pengawas Sekolah.
3. Faktor yang mendukung BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan upaya penanganan culture shock adalah sebagai berikut: pertama adanya pembagian tugas yang terstruktur, kedua memiliki sumber daya pegawai yang kompeten untuk

memberikan data yang valid, ketiga BPMP melakukan koordinasi yang intensif melalui program management office (PMO) dan Rapat Reboan, keempat pengalaman semasa covid-19 telah menambah kemampuan para pegawai BPMP dan satuan pendidikan dalam melaksanakan koordinasi melalui platform video conference.

4. Faktor yang menghambat BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan upaya penanganan culture shock adalah sebagai berikut: pertama perubahan kewenangan yang dimiliki BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat melakukan pelatihan dan bimtek secara hierarki kepada guru dan tenaga kependidikan, kedua adalah terkait jumlah pegawai Jabatan Fungsional yang masih terbatas, dan yang ketiga masih terdapat sebagian kecil guru dan tenaga kependidikan yang merasa belum mampu untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka.

Saran

1. Sebaiknya BPMP melakukan pendekatan secara kewilayahan hingga pada lapisan terbawah untuk mempermudah pemetaan pendampingan berkelanjutan kepada satuan pendidikan yang memiliki kategori rendah dan belum memutuskan untuk melaksanakan

Kurikulum Merdeka. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pihak BPMP untuk menentukan satuan pendidikan mana yang akan dilakukan pendampingan mengingat wewenang yang dimiliki sangat luas yaitu mencakup satu provinsi.

2. Beberapa program pelayanan kepada satuan pendidikan dilakukan secara daring dan melalui laman resmi, diharapkan BPMP melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap laman resmi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Dianingrum, S. K., & Sitorus, O. F. (2022). Analisis culture shock pada pegawai di era new normal. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 9(4), 680-688. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.433>.
- Firdaus, A. R., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai pancasila dalam meningkatkan sumber daya manusia indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 5(1), 184-191. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1447>.
- Haderani, H. (2018). Tinjauan filosofis tentang fungsi pendidikan dalam hidup manusia. Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 7(1), 41-49.
- Pujyati, I. (2022). Culture shock pada penerapan kebijakan merdeka belajar. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Indriane, E. (2012). Culture adjustment training untuk mengatasi culture shock pada mahasiswa baru yang berasal dari luar jawa barat. Jurnal Insan, 14, 150- 151.
- Madjid, A. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan. Samudra Biru. Mendikbudristek RI. (2022).
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Moleong, L. J. (2014). Qualitative research methodology. PT Remaja
- Rosdakarya. Muin, I. (2006). Sosiologi sma/ma jilid 3 untuk kelas xii. Erlangga.
- Utami, L. S. S. (2015). Teori-teori adaptasi antar budaya. Jurnal komunikasi, 7(2), 180-197. <https://doi.org/10.24912/jk.v7i2.17>.